



**KONSTRUKSI PEMBERITAAN KONFLIK KELOMPOK
AHMADIYAH DI KABUPATEN SINTANG
(Analisis *Framing* Pada Media *Online* Tempo dan Republika)**

Liana Nur Arifatul Inayah,¹ Muhamad Hizbullah²

¹IIQ Jakarta; Email : lyanaalthafunnisa@gmail.com

²IIQ Jakarta; Email: mhizbullah@iiq.ac.id

Abstract

Keywords:

Ahmadiyah.,
Framing
Analysis.,
Analysis
Framing Robert
N. Entman.,
Sintang
Ahmadiyah
Conflict.

The Ahmadiyah conflict in Sintang Regency began when the local government closed the operation of the Miftahul Huda mosque which caused controversy on social media, until the destruction of the mosque on September 3, 2021. During the event, some groups stated the role of local governments that made the escalation of the conflict escalate, some others saw the government simply ignore. Therefore, this study aims to examine the framing of Tempo and Republika in the August-September 2021 edition, when covering the complexity of the Ahmadiyah Sintang conflict. Based on the constructivistic paradigm, this study uses a qualitative approach to the analysis of Robert N. Framing. Entman, which focuses on the study of selection and highlights the problem. The results showed that Tempo tends to appeal to the humanism side, Local Government is framed as a trigger for conflict. While Republika tended to draw the case to a peaceful settlement, the Sintang government was framed as a party that did not maximally prevent conflict. In the perspective of the social construction of reality, the different views of the two media show that news is not a real thing, but is constructed in such a way.

Abstrak

Kata Kunci:
Ahmadiyah.,
Analisis
Framing.,
Analisis
Framing Robert
N. Entman.,
Konflik
Ahmadiyah
Sintang.

Konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang berawal dari pemerintah wilayah menutup kegiatan operasional masjid Miftahul Huda, yang membuat kontroversi di media sosial, hingga terjadi perusakan masjid pada 3 September 2021. Dalam peristiwa tersebut, beberapa kelompok menyatakan adanya peran pemerintah wilayah yang membuat eskalasi konflik meningkat, beberapa lain melihat pemerintah hanya abai. Maka darinya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembedaan Tempo dan Republika edisi Agustus-September 2021, ketika meliput kompleksitas konflik Ahmadiyah Sintang. Berdasar pada paradigma konstruktivistik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis Framing Robert N. Entman, yang memfokuskan kajian pada seleksi dan penonjolan isu. Hasil penelitian menunjukkan Tempo cenderung menarik pada sisi humanisme, pemerintah wilayah dibingkai sebagai pihak pemicu konflik. Sedangkan Republika cenderung menarik kasus pada penyelesaian damai, Pemerintah Sintang dibingkai sebagai pihak yang kurang maksimal mencegah konflik. Dalam perspektif konstruksi sosial atas realitas, adanya pandangan berbeda dari kedua media memperlihatkan bahwa berita bukan suatu yang riil, tetapi dikonstruksi sedemikian rupa.

PENDAHULUAN

Eksistensi kelompok Ahmadiyah hingga saat ini masih menjadi persoalan. Sejak kedatangan Ahmadiyah ke Indonesia pada 1924, kehadirannya menuai banyak kontroversi, terutama terkait konsep *nubuwwat* (kenabian) yang mereka yakini (Ummah, 2016). Kemunculan SKB Tiga Menteri sebagai pendekatan hukum dan pereda konflik antar Ahmadiyah dan Islam arus utama, juga menuai pro dan kontra. Sebagaimana menurut (Karman, 2013) beberapa mengatakan bahwa Ahmadiyah merupakan persoalan serius, jika tidak segera ditanggulangi akan memicu pemahaman yang salah terkait ajaran pokok umat Islam. Beberapa pihak mengatakan bahwa regulasi tersebut terlalu berlebihan, karena mencederai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terkait kebebasan beragama, dan dianggap menjadi alat untuk menaungi tindakan represi kepada Ahmadiyah.

Seperti dalam peristiwa Masjid Miftahul Huda milik kelompok Ahmadiyah yang dirusak oleh sejumlah massa di Sintang, Kalimantan Barat, pada Jum'at 03 September 2021, dan sebelumnya terjadi penyegelan masjid tersebut oleh pemerintah wilayah pada 04 Agustus 2021. Masjid yang merupakan tempat ibadah milik kelompok Ahmadiyah, dihancurkan oleh massa menggunakan berbagai alat seperti batu, kayu ataupun bambu (Tanjung & Irdiansyah, 2021). Aksi tersebut menambah daftar panjang tindakan diskriminatif terhadap Ahmadiyah.

Kontroversi Ahmadiyah yang kembali terulang, memicu beragam media untuk membingkai fenomena tersebut. Terlebih, insiden itu muncul di tengah upaya pemerintah memberantas *fanatisme* agama, dengan mengaplikasikan Islam moderat atau biasa dikenal dengan moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi contoh pelaksanaan *wasatiyah al-din* (jalan tengah dalam beragama), dengan menafikan perilaku ekstrem dalam beragama. Agama menjadi pijakan moral bagi pemeluknya, dan tidak dijadikan tujuan yang justru dapat menimbulkan gesekan antar sesama masyarakat (Asyhar, 2021).

Pada peristiwa demikian, media menjadi setir dalam penyebaran informasi. Sudah tidak menjadi hal baru bahwa media merupakan agen konstruksi yang memiliki kekuatan untuk memilah realitas yang akan dipublikasi. Realitas tersebut akan membentuk interpretasi masyarakat, dan terkadang menafikan realitas lain yang terdapat dalam isu. Maka darinya perlu pengkajian lebih dalam terhadap media, mengingat kebenaran yang disajikan belum tentu tepat karena tidak menyeluruh (Adawiyah & Moefad, 2020). Lebih lanjut, menurut (Eriyanto, 2018) media juga kerap memberi simbol-simbol tertentu, yang akan memperlihatkan bagaimana peristiwa dipahami, siapa yang menjadi pahlawan dan siapa yang dilihat sebagai musuh.

Berdasarkan hal di atas, dalam perspektif komunikasi analisis *framing* merupakan alternatif untuk mengetahui bagaimana realitas dilihat dan dikonstruksi. Bahkan menurut (Vreese, 2005), *framing* tidak hanya dilihat sebagai produk (bingkai dalam berita) atau efek (konsekuensi dari pembedaan), tetapi proses atau strategi media yang terintegrasi, tidak hanya melibatkan jurnalis tetapi juga ditekankan oleh beberapa faktor. *Framing* adalah upaya atau strategi yang digunakan untuk menekan isu agar terlihat mencolok, dan menjadi pembicaraan.

Adapun penelitian terkait analisis *framing* untuk mengetahui konstruksi pemberitaan media pernah dilakukan (Magribi, 2019), yang bertajuk “Analisis *Framing* Pemberitaan Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas.com dan Republika.co.id Periode Februari-April 2018.” Peneliti tersebut menemukan perbedaan konstruksi dari Kompas dan Republika. Walau keduanya menggambarkan kasus penyerangan ulama sebagai isu hoaks, namun terdapat motif politik dalam pemberitaan Kompas. Kompas cenderung fokus pada peningkatan citra pemerintah dalam menanggulangi hoaks, sedangkan Republika justru mengkritik pemerintah yang lamban menangani hoaks.

Penelitian (Nurfadillah & Ardi, 2021) berjudul “Analisis *Framing* Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita *Online* CNN Indonesia Periode 19 Februari-03 Maret 2021,” menyimpulkan bahwa *headline* berita dalam CNN memiliki unsur 5W+1H yang sempurna, dan peristiwa tentang penembakan ini diulas lebih dalam oleh CNN ditandai dengan isi sajian yang panjang dan informatif. Dalam penelitian ini, pemberitaan CNN dikonstruksi sebagai pelanggaran HAM oleh pihak Polri, di mana CNN cenderung memihak pada korban (Laskar FPI) dan menyudutkan pihak kepolisian.

Kemudian penelitian (Zarwan, Petroza, Mukti, & Rafsanjani, 2022), yang bertajuk “Analisis *Framing* Media Kompas dan New York Times Terhadap Pemberitaan Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua,” mengungkap adanya hegemoni media yang mempengaruhi isi berita. Dalam mengemas konflik sosial tersebut, Kompas lebih menekan pada keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua. Sedangkan New York Times memandang, bahwa konflik tersebut merupakan kristalisasi dari pelanggaran HAM pada rakyat Papua yang sudah lama terjadi.

(Vusfitasari, Alfani, & Rosihan, 2020) dalam penelitian berjudul, “Konstruksi Realitas Konflik Sosial di Media *Online*: Analisis *Framing* Pemberitaan Konflik di Wamena Papua Pada Cepenonline.com, ANTARA Papua dan KabarPapua.co.” Penelitian tersebut juga mengungkap bagaimana media mengkonstruksi konflik, yang memperlihatkan bahwa

Ceposonline.com lebih berpihak pada warga Papua, sedangkan ANTARA Papua dan KabarPapua.co cenderung mengacu pada pemerintah.

Konflik pada dasarnya merupakan keniscayaan yang tak dapat dinafikan oleh manusia. Menurut (Plummer, 2022), kemunculan konflik bisa disebabkan oleh perbedaan, baik dari segi pemahaman, perbedaan kepentingan, maupun keyakinan seseorang. Fenomena agama yang dikaitkan dengan konflik sosial, menjadi sajian menarik bagi media, karena konflik lebih potensial disebut sebagai berita dibanding peristiwa lain. Bahkan dalam kacamata jurnalistik semakin tinggi tingkat konfliknya, semakin besar nilai beritanya. Hal ini dikarenakan suatu berita dikatakan layak apabila mengandung unsur kejelasan (*clarity*) atas kejadiannya, kejutan (*surprise*), kedekatan (*proximity*) secara geografis, serta terdapat dampak dan konflik personalnya (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2018).

Dalam paradigma konstruktivistik, realitas merupakan hasil konstruksi dari interaksi dan tindakan yang dilakukan individu secara terus menerus (Bungin, 2008). Menurut (Berger & Luckmann, 1966) manusia mengalami tiga momen dalam memahami realitas, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Adapun berita merupakan hasil pemahaman wartawan dalam memahami realitas, dan tidak terlepas dari ketiga momen tersebut. Peristiwa yang nampak tidak beraturan dapat dipahami secara terstruktur oleh masyarakat, karena wartawan telah mengidentifikasi dan mengkontekstualisasi dengan menghubungkan peristiwa pada kejadian lain yang relevan (Eriyanto, 2002), hal demikian yang disebut Stuart Hall dengan konstruksi berita. Maka darinya, dalam pemberitaan konflik Ahmadiyah bisa terjadi perbedaan konstruksi. Boleh jadi satu media mendefinisikannya sebagai konflik sosial, sedangkan media lain melihatnya sebagai penyimpangan agama. Dua realitas ini menjadi penting karena sebagai penentu akan reaksi masyarakat terhadap isu. Hal demikian dikarenakan fungsi media sebagai alat peredam konflik, bukan menjadi penyebab konflik yang justru akan memperburuk keadaan (Juditha, 2016).

Maka dari itu, penulis tertarik mengkaji lebih dalam “Konstruksi Pemberitaan Konflik Kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Sintang (Analisis *Framing* Pada Media *Online* Tempo dan Republika).” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi pemberitaan pada Tempo dan Republika tatkala mengemas konflik kelompok Ahmadiyah di Sintang. Kanal Tempo menjadi pilihan penulis, menilik dari berita yang dipaparkan Tempo cukup luas terkait isu ini. Sedangkan Republika.co.id penulis pilih melihat historis Republika sendiri dibentuk atas keinginan wartawan muslim, yang membuat sajian informasinya bercirikan Islam sehingga relevan dengan isu yang akan dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis *framing* sebagai medium pengamatannya. Selain itu, penelitian ini berdasar pada paradigma konstruktivistik yang memandang bahwa suatu realitas itu berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisir. Subjek yang digunakan adalah media *online* Tempo (Tempo) dan Republika (Republika.co.id). Sedangkan objeknya yakni teks berita konflik Ahmadiyah di Sintang (berupa penyegelan hingga perusakan masjid), periode Agustus-September 2021. Penulis memilih periode tersebut, melihat rangkaian peristiwa dimulai dari penyegelan pada bulan Agustus, hingga perusakan masjid di bulan September 2021. Penentuan periode tersebut diharapkan dapat mempermudah pembaca karena ada unsur kebaruan berita, serta kelengkapan penelitian untuk melihat seberapa jauh isu tersebut dianggap penting oleh Tempo dan Republika.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan, memilih, mengklasifikasi, mencatat dan menelaah teks berita yang dilengkapi dengan judul, tanggal dan narasumber, dengan harapan data lebih valid dan menyeluruh. Data primer yang digunakan yakni teks berita tentang Ahmadiyah di Sintang pada Tempo dan Republika periode Agustus-September 2021. Sedangkan data sekundernya, menggunakan artikel, buku, internet serta berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni analisis *Framing* model Robert N. Entman yang memfokuskan penelitian pada seleksi dan penonjolan isu, dengan menggunakan empat perangkat, di antaranya *define problems* (pendefinisian masalah, peristiwa dilihat sebagai masalah apa), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral, memberi nilai moral yang dipakai sebagai penguat argumentasi), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian, solusi yang ditawarkan). Melalui empat perangkat ini, penulis menganalisis teks berita Tempo dan Republika, kemudian membandingkan hasil analisis kedua media tersebut. Lebih lanjut, penulis memilih perangkat *Framing* Robert N. Entman karena dirasa mampu untuk mengungkap bagaimana keberpihakan media terhadap peristiwa, melalui penonjolan realitas yang disajikan Tempo dan Republika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Data

Pada pemberitaan mengenai konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang periode Agustus-

September 2021, penulis menemukan 20 berita yang diunggah Tempo. Sedangkan untuk Republika, penulis menemukan 14 berita. Penulis melihat bahwa Tempo mulai memublikasikan isu tersebut sejak peristiwa penyegelan terjadi, yakni 2 artikel pada Agustus 2021. Berbeda dengan Tempo, Republika mulai mengunggah pemberitaan sejak perusakan masjid. Namun keduanya sama-sama memberi perhatian dalam peristiwa ini. Menurut hemat penulis, konflik perusakan masjid Ahmadiyah di Kabupaten Sintang dinilai Tempo dan Republika sebagai isu penting. Dalam satu minggu penuh, keduanya mencoba memaparkan kejadian tersebut. Intensitas kedua media yang terus menerus menyajikan isu yang sama, menandakan adanya agenda media yang akan menentukan seberapa jauh kesadaran publik atas isu yang terjadi (Morissan, Corry, & Hamid, 2013).

Lebih lanjut, dari keseluruhan artikel yang disajikan penulis melihat tiga isu utama yang menjadi pokok pembahasan dalam mengemas konflik Ahmadiyah di Sintang, di antaranya, isu pengambilalihan kasus, isu peran pemerintah wilayah, dan isu latar belakang peristiwa. Sebagaimana hal tersebut, penulis memilih sampel sebanyak 8 artikel dari Tempo dan Republika yang disesuaikan dengan ketiga isu di atas. Berikut rincian judul artikel yang dimaksud:

Tabel 1.
Sampel Artikel Isu Pengambilalihan Kasus

No	Judul Artikel	Tanggal Publikasi
1	Pengusutan Kasus Masjid Ahmadiyah, Kabareskrim: Cukup Ditangani Polda Kalbar (Tempo)	
2	Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah (Republika)	

Tabel 2.
Sampel Artikel Isu Peran Pemerintah Wilayah

No	Judul Artikel	Tanggal Publikasi
1	Menag Minta Aparat Tindak Tegas Kasus Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah (Tempo)	Jum'at, 3/9/2021
2	Amnesty Desak Pengusutan Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang (Tempo)	Sabtu, 4/9/2021
3	Warga Diminta Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah (Republika)	Minggu, 5/9/2021

4	Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan (Republika)	Senin, 6/9/2021
---	---	-----------------

Tabel 3.
Sampel Artikel Isu Latar Belakang Peristiwa

No	Judul Artikel	Tanggal Publikasi
1	Komnas HAM Sebut Surat Bersama Pemda Picu Pembakaran Masjid Ahmadiyah Sintang (Tempo)	Sabtu, 4/9/2021
2	Pemkab Tak Tegas Antisipasi Pengrusakan Masjid Ahmadiyah (Republika)	Minggu, 5/9/2021

Artikel-artikel di atas, dianalisis menggunakan empat perangkat Robert N. Entman, untuk melihat bagaimana perbandingan konstruksi yang digunakan Tempo dan Republika dalam membingkai konflik Ahmadiyah di Sintang.

Isu Pengambilalihan Kasus

Dalam peristiwa konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, beberapa kelompok menyatakan bahwa kejadian tersebut merupakan buah dari ketidakberhasilan pemerintah wilayah untuk meminimalisir konflik. Salah satunya yakni Komnas HAM yang meminta penanganan kasus diambil alih oleh Mabes Polri, karena menilai Polda Kalimantan Barat tidak dapat menangani dengan maksimal. Hal tersebut menjadi permulaan adanya isu pengambilalihan kasus tatkala menangani konflik perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, yang melahirkan tanggapan dari Mabes Polri. Persoalan demikian membuat Tempo dan Republika juga menyajikan pemberitaan terkait tanggapan Mabes Polri atas isu pengambilalihan kasus.

Dalam isu pengambilalihan kasus, pemingkai dilakukan Tempo melalui artikel, *"Pengusutan Kasus Masjid Ahmadiyah, Kabareskrim: Cukup Ditangani Polda Kalbar,"* Tempo cenderung menyoroti ketidakberhasilan Polda Kalbar untuk mencegah konflik terjadi. Terlihat bahwa Tempo memuat kembali di artikel tersebut, terkait kritik Komnas HAM terhadap kinerja Polda Kalbar. Kritik tersebut berisi anggapan, bahwa perusakan masjid terjadi karena Polda Kalbar tidak maksimal menangani eskalasi konflik di antara masyarakat. Untuk memperkuat klaim ini, sebelumnya Tempo juga menyajikan artikel tentang kritik Komnas HAM yang meminta Mabes Polri mengambil alih kasus, dengan judul *"Alasan Komnas HAM Minta Mabes Polri Ambil Alih Kasus Masjid Ahmadiyah Sintang."*

Hal di atas membuat artikel ini hanya memuat dua narasumber saja, yakni Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, dan Kabareskrim Agus. Yang mana keduanya saling berkomentar dan menanggapi, Tempo sebagai media berperan mengaitkan satu sama lain. Akan tetapi, walau disebutkan oleh Mabes Polri bahwa tak perlu ada pengambilalihan kasus, secara tidak sadar Tempo telah menyusun agenda, dengan memberi ulasan ulang tentang kritik Komnas HAM, bahwa ternyata ada kekurangan dari kinerja Polda Kalbar dalam mencegah konflik di Sintang. Hal demikian dikarenakan, penetapan agenda tertentu oleh sebuah media, merupakan hasil dari pelaporan berita sebelumnya yang dianggap dapat menghasilkan perhatian publik (McComb, 2010).

Berbeda dengan Tempo, melalui artikel "*Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah,*" Republika justru menganggap kinerja Polda Kalbar sudah cukup maksimal. Maka darinya, tak perlu ada pengambilalihan kasus. Hal tersebut ditekankan Republika dengan menyertakan sebagian besar teks artikel ini, untuk memuat langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Kalbar. Maka darinya, artikel ini memuat empat narasumber, yang mana dua di antaranya memberikan pernyataan-pernyataan terkait langkah kepolisian. Sementara itu, adanya pemaknaan citra tertentu yang diterapkan Republika kepada Polda Kalbar, memperlihatkan bahwa media ini cenderung memihak pihak tersebut. Kecenderungan yang disajikan dengan penekanan-penekanan demikian, akan membuat perspektif tertentu bagi khalayak ketika memandang Polda Kalbar.

Selain itu, berbeda dengan Tempo yang menyertakan isu pengambilalihan kasus kepada Mabes Polri, disebabkan adanya permintaan dari Komnas HAM, Republika sama sekali tidak menyinggung hal tersebut. Pada paragraf terakhir, Republika hanya memuat tulisan desakan dari Komnas HAM untuk pengusutan kasus segera diselesaikan. Republika tidak menyoroti isu tentang Polda Kalbar yang kurang maksimal mencegah perusakan masjid terjadi.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat tergambar bahwa terdapat bagian yang dihilangkan, dan ditekankan oleh kedua media tersebut. Walau keduanya mengulas tanggapan dari Mabes Polri tentang kasus tak perlu diambil alih, di mana Mabes Polri cukup sebagai asistensi yang mengiring isu Ahmadiyah Sintang ini hingga selesai, namun tetap terlihat penonjolan apa yang ditekankan, bagian apa yang dihilangkan oleh Tempo dan Republika. Seperti Tempo yang memandang bahwa Polda Kalbar sempat gagal untuk mencegah kasus terjadi, menekankan pada kritik Komnas HAM yang diulas kembali. Sedangkan dalam Republika, bagian tentang kritik Komnas HAM justru dihilangkan, yang mana bagian tersebut merupakan alasan adanya tanggapan dari Mabes Polri.

Isu Peran Pemerintah Wilayah

Dalam peristiwa konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang, peran pemerintah wilayah cukup menjadi sorotan. Beberapa kelompok menyatakan bahwa kejadian tersebut memiliki keterkaitan dengan pemerintah wilayah, di mana sebelum perusakan terjadi, penyegelan masjid dilakukan oleh Pemerintah Sintang, yang mana persoalan demikian secara implisit juga disajikan Tempo dan Republika melalui artikel-artikelnya.

Pembingkaiannya Tempo pada isu ini melalui artikel, *“Menag Minta Aparat Tindak Tegas Kasus Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah,”* dan *“Amnesty Desak Pengusutan Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang.”* Dalam kedua artikel tersebut, Tempo cenderung melihat peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang sebagai diskriminasi agama. Pada bingkai Tempo, terdapat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh pelaku perusakan, di mana hal tersebut melanggar aturan negara tentang hak asasi manusia. Pada kaitan ini, peran pemerintah wilayah menjadi sorotan Tempo. Media ini cenderung melihat Pemerintah Sintang sebagai pendukung kelompok intoleran. Terlihat dari pilihan narasumber yang digunakan oleh Tempo, media ini memilih Amnesty sebagai pihak yang kontra atas tindakan Pemerintah Sintang, yang menutup kegiatan operasional masjid Ahmadiyah sebelum perusakan terjadi. Tindakan tersebut dinilai Tempo sebagai pemicu terjadinya perusakan masjid Ahmadiyah oleh massa.

Berbeda dengan Tempo, pembingkaiannya Republika melalui artikel *“Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan,”* dan *“Warga Diminta tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah,”* cenderung melihat langkah pemerintah wilayah dalam penutupan rumah ibadah sudah tepat. Pemerintah Sintang, dan Aliansi Umat Islam dinilai hanya mengikuti amanat konstitusi SKB 3 Menteri (regulasi tersebut mengandung larangan atas aktifitas Ahmadiyah). Sedangkan peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah, dianggap sebagai kejadian tak terduga. Republika tidak menilai penutupan masjid oleh pemerintah wilayah sebagai cikal bakal terjadinya konflik. Dalam kasus ini, Republika hanya menganggap Pemerintah Sintang belum optimal untuk mengantisipasi konflik Ahmadiyah di Sintang. Adapun narasumber yang digunakan pada kedua artikel ini yakni Kepala PKUB Kemenag Nifasri pada artikel *“Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan,”* dan Wakil Komisi II DPR RI Junimart pada artikel *“Warga Diminta tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah.”* Keduanya bahkan memberi pernyataan yang secara tidak langsung terlihat memihak pemerintah daerah.

“Karena kerukunan secara umum di Kalbar itu baik sebenarnya. Bahkan FKUB-nya sendiri, dan pemdanya, tahun lalu itu mendapatkan Harmony Award. Saya sendiri

tidak menduga itu akan terjadi. Karena di dalam pemetaan isu-isu keagamaan kami, Kalimantan itu aman-aman saja," ujar Nifasri.

"Berdasarkan informasi yang diterimanya, tidak terdapat pembiaran dari Pemerintah dan APH menyangkut penutupan dari rumah ibadah Ahmadiyah tersebut. "Pemerintah Kabupaten Sintang, APH dan aliansi umat sesungguhnya hanya menjalankan konsistensi dan konsekuensi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2008, yaitu Menteri Agama, Mendagri, dan Jaksa Agung. Seingat saya SKB itu menyangkut pelarangan kegiatan Ahmadiyah," ujar Junimart Girsang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat bahwa skema peran Pemerintah Sintang yang ditampilkan Tempo dan Republika berbeda. Keduanya memahami, memproses, mengaitkan, dan melaporkan semua informasi dengan cara yang mendukung interpretasi dasar mereka ketika memandang Pemerintah Sintang. Seperti Tempo misalnya, membingkai peristiwa tersebut sebagai kasus diskriminasi agama yang memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Sintang. Sebaliknya, Republika justru memandang peristiwa tersebut sebagai konflik keagamaan antar dua kelompok, Pemerintah Sintang ditempatkan sebagai pihak ketiga yang gagal mengatasi konflik.

Kemudian jika melihat pada penempatan kanal, Tempo menyajikan artikel-artikelnya di kanal Nasional. Hal ini menandakan bahwa isu tentang Ahmadiyah Sintang menjadi perhatian Tempo sendiri. Perusakan masjid Ahmadiyah dinilai sebagai kasus yang mencederai kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun Republika menempatkan kedua artikel di atas pada kanal khazanah dan nusantara.¹ Ini mengartikan bahwa secara substansi isu Ahmadiyah di Sintang dinilai sebagai masalah umat, dan juga masalah daerah oleh Republika.

Isu Latar Belakang Peristiwa

Pembingkaiannya Tempo dan Republika pada isu ini, sebetulnya memiliki keterkaitan dengan isu sebelumnya, yakni tentang peran pemerintah wilayah. Pada isu ini, penulis menemukan perbedaan yang kontras dari kedua media, terlihat dari pembingkaiannya yang diseleksi dan ditekankan oleh masing-masing artikel. Meski keduanya menggunakan narasumber yang sama yakni Komnas HAM, tetapi pernyataan yang disampaikan Komnas HAM dibingkai secara berbeda.

¹Kanal khazanah merupakan kanal yang berisi artikel-artikel bernuansa Islam, dari pembahasan mengenai kesejahteraan, kontroversi dunia Islam, konflik, ekonomi, aktifitas muslim, dan lainnya. Sedangkan nusantara berisi artikel-artikel yang memuat konflik, politik, ekonomi, dan lain-lain yang disesuaikan pada provinsi-provinsi di Indonesia.

Tempo pada isu latar belakang peristiwa ini dibingkai melalui artikel, "*Komnas HAM Sebut Surat Bersama Pemda Picu Pembakaran Masjid Ahmadiyah Sintang.*" Tempo cenderung melihat keterlibatan pemerintah setempat yang memicu peristiwa perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang. Pernyataan Komnas HAM dijadikan sebagai penekanan oleh Tempo, bahwa penandatanganan Surat Keputusan Pemerintah Sintang, dan pejabat setempat tentang pelarangan aktifitas Ahmadiyah sebagai pemicu lahirnya konflik tipis di media sosial, yang berujung pada peristiwa perusakan. Hal di atas menjadi poin krusial Tempo dalam membangun pesan melalui artikel tersebut.

Berbeda dengan Tempo, realitas yang dibangun oleh Republika melalui artikel, "*Pemkab tak Tegas Antisipasi Pengrusakan Masjid Ahmadiyah,*" yakni terkait kelalaian Pemerintah Sintang untuk mencegah konflik di masyarakat. Ujaran kebencian, dan provokasi kekerasan menjadi poin utama yang diangkat Republika, sebagai latar belakang terjadinya konflik. Namun isu tentang penandatanganan SK oleh Pemerintah Sintang dihilangkan, di mana Republika hanya membuat pernyataan tentang adanya serangkaian kebijakan dari Bupati, Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kemenag Wilayah menjadi faktor pendukung lahirnya konflik Ahmadiyah di Sintang. Secara eksplisit, hal tersebut akan terlihat sebagai penandatanganan SK jika saja khalayak aktif membandingkan narasi berita ini dengan berita media lainnya. Namun, tentu saja berbeda jika khalayak hanya melihat pada satu sisi berita ini. Hal demikian dikarenakan, Republika mengaitkan pembahasan ini dengan mengutip perkataan Komnas HAM yang berbunyi, "*Di mana serangkaian ujaran kebencian dan ajakan kekerasan lewat internet yang dilakukan sekelompok massa dibiarkan begitu saja.*" Tentu khalayak hanya akan terfokus pada "ujaran kebencian yang diabaikan oleh Pemerintah Sintang" yang menjadi latar belakang konflik.

Selain itu, pada solusi yang ditawarkan Tempo membingkai adanya kecacatan dalam SKB 3 Menteri tahun 2008 tentang Ahmadiyah, maka darinya regulasi tersebut perlu dicabut. Tempo melihat SKB 3 Menteri ini menjadi sebab utama, lahirnya regulasi lain dari pemerintah wilayah. Sedangkan, Republika lebih mengutamakan peningkatan pada peran Pemerintah Sintang untuk memberi perlindungan, dan memulihkan hak konstitusi Ahmadiyah.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat terlihat bentuk *Framing* yang berbeda di antara keduanya. Menurut (Entman, 1991) jika salah satu sisi bingkai diperbesar, sisi lainnya diperkecil, maka laporan dari masing-masing media yang identik berbeda dapat menembus kesadaran khalayak. Tempo membingkai latar belakang konflik disebabkan oleh Pemerintah Sintang, yang mana laporan ini diperbesar, dengan menghubungkan peristiwa penandatanganan SK, penyegelan masjid, mulai munculnya konflik di media, hingga

perusakan terjadi sebagai puncak konflik. Ini menjadi upaya Tempo untuk membuat peristiwa yang tak beraturan menjadi sebuah cerita yang dapat dipahami khalayak. Begitu juga dengan Republika, yang membingkai adanya kelalaian dari Pemerintah Sintang, dengan memaparkan usaha Komnas HAM mencegah eskalasi konflik di media sosial, pemerintah abai dengan hal itu, hingga perusakan terjadi. Kedua peristiwa tersebut, diidentifikasi oleh wartawan, kemudian wartawan menghubungkan dengan peristiwa lain, hingga terbentuklah konstruksi berita dari masing-masing media.

Interpretasi

Secara ideologis, Tempo merupakan media yang menjunjung pluralisme. Melalui kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang, Tempo kerap mendelegitimasi tindakan anarkisme dari Aliansi Umat Islam. Jika melihat jejak histori, pemberitaan Tempo juga diwarnai dengan perjuangannya mengusung pluralisme. Hal demikian dikatakan (Steele, 2011) seorang professor asosiasi media, tentang pengalamannya menghadiri rapat redaksi Tempo, di mana banyak pihak yang bertukar pendapat untuk terus menguatkan unsur kebebasan beragama. Berbicara soal Ahmadiyah, pihak Tempo juga menuturkan dalam Kecap Dapur Tempo, bahwa terkait isu yang satu ini pemihakan Tempo terlihat jelas. Tempo konsisten untuk melihat Ahmadiyah bukan dari segi ketimpangan agamanya, melainkan sisi humanis di mana manusia berhak mempunyai keyakinan (Setyarso & Hidayat, 2011).

Selanjutnya pada bagian penempatan korban, Tempo cenderung memberi penulisan yang memicu empati kepada Ahmadiyah. Ahmadiyah ditekankan sebagai korban yang kehilangan hak-haknya. Kata “merusak, mengobrak-abrik, menyerang,” sering penulis jumpai pada artikel-artikel Tempo ketika menjelaskan tentang kejadian. Dalam hal ini, Tempo sama sekali tidak menyajikan realitas bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang menyimpang. Tempo lebih fokus terhadap hak-hak kemanusiaan yang mesti didapat oleh Ahmadiyah.

Adapun Republika secara ideologis lebih mengutamakan kepentingan umat Islam. Republika selalu mengedepankan nilai-nilai sejuk, toleran, menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam (Hamad, 2004). Yang mana dalam isu Ahmadiyah Sintang, media ini lebih menarik kasus pada penyelesaian damai. Kata “musyawarah, dialog antar umat,” seringkali penulis jumpai pada artikel-artikel dalam Republika. Walau tetap tak membenarkan tindakan perusakan oleh massa, realitas tentang penyimpangan agama yang dilakukan Ahmadiyah juga tidak dihilangkan oleh Republika. Oleh karenanya, Republika cenderung tidak memberi penekanan empati pada Ahmadiyah, seperti yang dilakukan

Tempo. Pengurangan penekanan pada Ahmadiyah membuat cerita yang dibuat menjadi cerita teknis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk pada hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan konstruksi dalam Tempo dan Republika tatkala mengemas konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Sebagai media yang selalu mengusung pluralisme, Tempo cenderung menarik masalah pada sisi *humanisme*, di mana Ahmadiyah kehilangan hak konstitusinya dalam hal kebebasan beragama. Posisi Pemerintah Sintang dan pihak kepolisian Sintang, dibingkai secara tidak langsung oleh Tempo, sebagai pihak yang mendukung intoleransi. Pemerintah wilayah dinilai sebagai pihak di balik terjadinya konflik Ahmadiyah di Kabupaten Sintang. Sementara itu, Tempo sama sekali tidak menyajikan realitas bahwa Ahmadiyah merupakan aliran yang menyimpang. Tempo lebih fokus terhadap hak-hak kemanusiaan yang mesti didapat oleh Ahmadiyah.

Berbeda dengan Tempo, bingkai media yang dilakukan Republika cenderung mengutamakan kepentingan umat Islam, yang mana pada isu ini Republika selalu menarik kasus pada penyelesaian damai. Republika lebih menyoroti sikap dan peran Pemerintah Sintang serta kepolisian setempat, untuk menindaklanjuti kasus perusakan masjid Ahmadiyah di Sintang. Konflik Ahmadiyah di Sintang dinilai sebagai sebagian kecil peristiwa intoleransi yang terjadi. Pemerintah Sintang dibingkai sebagai pihak yang kurang maksimal mencegah konflik, dan tindakannya bukan pemicu lahirnya konflik. Realitas tentang penyimpangan agama yang dilakukan Ahmadiyah juga tidak dihilangkan oleh Republika. Tindakan pelaku memang tetap tak dapat dibenarkan, namun penyimpangan Ahmadiyah juga tidak bisa dibiarkan.

Berpijak pada telaah yang penulis lakukan, dalam proses penulisan berita konflik, media seharusnya menjadi *conflict resolution* (pengarah konflik) dengan memberi dua perspektif kemudian mengarahkannya kepada penyelesaian. Lebih lanjut, penelitian ini masih dapat dikembangkan dengan mengangkat tema yang sama, tetapi fokus pada hal pemingkai pemerintah wilayah dalam mengatasi konflik Ahmadiyah, terkait dengan politik identitas. Jika objek yang digunakan media *online*, penulis menyarankan untuk memberikan bahan analisis yang lebih kaya. Sebab dalam media *online*, faktor kecepatan membuat berita yang ringkas memiliki keterkaitan dengan berita lainnya.

REFERENSI

Buku

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality*. England: Penguin Group.
- Bungin, B. (2008). *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eriyanto. (2018). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS Group.
- Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*. Jakarta: Granit.
- Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2018). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan, Corry, A., & Hamid, F. (2013). *Teori Komunikasi Massa: Media Budaya dan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Plummer, K. (2022). *Sociology the Basics*, 3th ed. New York: Routledge.
- Setyarso, B., & Hidayat, B. (2011). *Seri Buku Tempo: Cerita di Balik Dapur Tempo 40 Tahun (1971-2011)*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Steele, J. (2011). Diskusi Hangat Rabu Siang. dalam Budi Setyarso dan Bagja Hidayat (ed.), *Seri Buku Tempo: Cerita di Balik Dapur Tempo 40 Tahun (1971-2011)* (pp. 72-74). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Jurnal

- Adawiyah, D. P. R., & Moefad, A. M. (2020). Konstruksi Realitas dan Framing Analysis Pemberitaan Kerusuhan Muslim-Hindu di India Pada Media Online CNN.com. *Orasi* 11, (2) 149-162.
- Entman, R. M. (1991). Framing U.S. Coverage of International News: Contrast in Narrative of the KAL and Iran Air Incidents. *Journal of Communication* 41, (4) 6-27.
- Juditha, C. (2016). Jurnalisme Damai Dalam Berita Konflik Agama Tolikara di Tempo. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik* 20, (2) 93-110.
- Karman. (2013). Media Massa dan Konstruksi Realitas: Analisis Framing Terhadap Pemberitaan SKB Menteri Tentang Ahmadiyah di Indonesia Pada Surat kabar Harian Suara Pembaruan dan Republika. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 17, (2) 173-186.
- McComb, M. (2010). Building Consensus: The News Media's Agenda Setting Roles," *Political Communication* Vol. 14 (4), 433-443. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/105846097199236>
- Nurfadillah, Z., & Ardi, M. (2021). Analisis Framing Berita Penembakan 6 Laskar FPI Pada Portal Berita Online CNN Indonesia Periode 19 Februari-03 Maret 2021. *Jurnal Komunikasi Islam* 2, (1) 1-14.
- Ummah, A. (2016). Ahmadiyah dan Hak Atas Kebebasan Beragama di Indonesia. *Jurnal Keamanan Nasional* 2, (1) 60-76.
- Vreese, C. H. d. (2005). News Framing: Theory and Typology. *Information Design Journal* 13, (1) 51-62.
- Vusfitasari, K. H. A., & Rosihan, A. (2020). Konstruksi Realitas Konflik Sosial di Media Online: Analisis Framing Pemberitaan Konflik di Wamena Papua Pada Ceyosonline.com, ANTARA Papua dan KabarPapua.co. *Jurnal Massa*. Vol. 1 (1), 83-99. DOI: <http://journal.unbara.ac.id/index.php/JM>
- Zarwan, R. R., Petroza, R., Mukti, S., & Rafsanjani, M. (2022). Analisis Framing Media Kompas dan New York Times Terhadap Pemberitaan Konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, (1) 103-115.

Lain-lain

- Aji, M. R., & Ari, E. (2021, September 6). *Alasan Komnas HAM Minta Mabes Polri Ambil Alih Kasus Masjid Ahmadiyah Sintang*. Retrieved Juni 9, 2022, from <https://nasional.Tempo/read/1503001/alasan-komnas-ham-minta-mabes-polri-ambil-alih-kasus-masjid-ahmadiyah-sintang>
- Aji, M. R., & Persada, S. (2021, September 6). *Komnas HAM Sebut Surat Bersama Pemda Picu Pembakaran Masjid Ahmadiyah Sintang*. Retrieved Juni 30, 2022, from <https://nasional.Tempo/read/1502910/komnas-ham-sebut-surat-bersama-pemda-picu-pembakaran-masjid-ahmadiyah-sintang>
- Amrullah, A., & Rezkisari, I. (2021, September 5). *Pemkab tak Tegas Antisipasi Pengrusakan Masjid Ahmadiyah*. Retrieved Juli 1, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qyxssf328/pemkab-tak-tegas-antisipasi-pengrusakan-masjid-ahmadiyah>
- Asyhar, T. A. (2021, Februari 14). *Moderasi Beragama di Tangan Gus Menteri Yaqut*. Retrieved Februari 2, 2022, from <https://kemenag.go.id/read/moderasi-beragama-di-tangan-gus-menteri-yaqut-kde9z>
- Deretan Penyerangan Terhadap Ahmadiyah, Cikeusik Hingga NTB. (2021, September). CNN Indonesia. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908142815-20-691467/deretan-penyerangan-terhadap-ahmadiyah-cikeusik-hingga-ntb> tanggal 7 Januari 2022.
- Magribi, F. I. (2019). *Analisis Framing Pemberitaan (Isu Penyerangan Ulama di Indonesia dalam Harian Kompas.com dan Republika.co.id Periode Februari-April 2018)* (Tidak Diterbitkan). Yogyakarta: Sarjana Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Mukhtar, U., & Nursalikhah, A. (2021, September 6). *Kemenag: Perusakan Masjid Ahmadiyah Kalbar di Luar Dugaan*. Retrieved Juni 27, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qz0cn0366/kemenag-perusakan-masjid-ahmadiyah-kalbar-di-luar-dugaan>
- Nurita, D., & Amirullah. (2021, September 3). *Menag Minta Aparat Tindak Tegas Kasus Perusakan Tempat Ibadah Ahmadiyah*. Retrieved Juni 25, 2022, from <https://nasional.Tempo/read/1502018/menag-minta-aparat-tindak-tegas-kasus-perusakan-tempat-ibadah-ahmadiyah>
- Rahma, A., & Ari, E. (2021, September 6). *Pengusutan Kasus Masjid Ahmadiyah, Kabareskrim: Cukup Ditangani Polda Kalbar*. Retrieved Juni 3, 2022, from <https://nasional.Tempo/read/1502938/pengusutan-kasus-masjid-ahmadiyah-kabareskrim-cukup-ditangani-polda-kalbar>
- Rezkisari, I. (2021, September 5). *Warga Diminta Tak Terprovokasi Perusakan Masjid Ahmadiyah*. Retrieved Juni 29, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qyy4l1328/warga-diminta-tak-terprovokasi-perusakan-masjid-ahmadiyah>
- Rezkisari, I. (2021, September 6). *Perusakan Masjid Ahmadiyah Sintang Ditangani Aparat Wilayah*. Retrieved Juni 23, 2022, from <https://www.republika.co.id/berita/qz0nqn328/perusakan-masjid-ahmadiyah-sintang-ditangani-aparat-wilayah>
- Riana, F., & Ari, E. (2021, September 4). *Amnesty Desak Pengusutan Kasus Perusakan Masjid Ahmadiyah di Sintang*. Retrieved Juni 26, 2022, from

<https://nasional.Tempo/read/1502243/amnesty-desak-pengusutan-kasus-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang>

Tanjung, E., & Isdiansyah, B. (2021, September 6). *Penyerangan Masjid Ahmadiyah di Sintang, JAI Desak Presiden Jokowi Turun Tangan*. Retrieved Januari 20, 2022, from <https://amp.suara.com/news/2021/09/06/155436/penyerangan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-jai-desak-presiden-jokowi-turun-tangan>